



Mahkamah Agung | Ditjenbadilmiltun
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



#bangga
melayani
bangsa **BerAKHLAK**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

REVISI RENCANA AKSI TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



(021) 22859672

www.ptun-jakarta.go.id



Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo
Gebang, Jakarta Timur, 13950





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950

No.Telp 021-22859672 ; Website : www.ptun-jakarta.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVISI
RENCANA AKSI TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Kami telah merevisi dokumen Rencana Aksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 sebagai upaya perbaikan / penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja untuk hasil yang lebih baik. Substansi informasi yang dimuat dalam rencana aksi menjadi tanggung jawab Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Rencana Aksi telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam rencana aksi ini.

Jakarta, 17 Desember 2025

Ketua



H. HUSBAN, S.H., M.H.
NIP. 197212231992031002

REVIU SHEET

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Revisi Rencana Aksi Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah di Reviu menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

No.	Perubahan		
	Semula	Menjadi	Alasan Perubahan
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Perubahan Indikator
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Perubahan Indikator
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Perubahan Indikator
	-	Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	Penambahan Indikator
	-	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	Penambahan Indikator
	-	Nilai kerja Perencanaan Anggaran.	Penambahan Indikator
	-	Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	Penambahan Indikator

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	-	Penghapusan indikator
----	--	---	-----------------------

Jakarta, 17 Desember 2025



Ketua

H. HUSBAN, S.H., M.H.
NIP. 197212231992031002



**Revisi Rencana Aksi Kinerja
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Tahun 2025**

Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG”

Dengan Misi :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 mencatumkan program, kegiatan, target dan anggaran, sebagaimana terlampir :

REVISI RENCANA AKSI KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	70%	70%	70%	70%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	85%	85%	85%	85%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	85%	85%	85%	85%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	80%	80%	80%	80%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	35%	35%	35%	35%
		1.6 Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court.	98%	98%	98%	98%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	1059.AEA Koordinasi					3 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 63.250.000,-
	001 Dukungan Penyelesaian Perkara	√	√	√	√	1 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 29.845.000,-
2.	1059.BCA. Perkara Hukum Perseorangan					1 Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 405.000,-
	001 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara		√			1 Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 405.000,-

3.	1059.QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				96 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 33.000.000,-
	001 - Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	√	√	√	√	96 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	2.1. Indeks kepuasan Pengguna Layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,70	3,70	3,75	3,75

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	1059.AEA Koordinasi					1 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 29.845.000,-
	001 Dukungan Penyelesaian Perkara	√	√	√	√	1 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 29.845.000,-
2.	1059.BCA. Perkara Hukum Perseorangan					1 Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 405.000,-
	001 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara		√			1 Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 405.000,-

3.	1059.QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan					96 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 33.000.000,-
	001 - Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	√	√	√	√	96 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 33.000.000,-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	75%	75%	75%	75%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	90%	90%	90%	90%
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.	85%	85%	85%	85%
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0	3,0	3,0	3,0

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	1071.EBB Layanan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	√	√		√	11 Unit	Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 222.190.000
2.	6986.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	√	√	√	√	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi , Unit	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 18.349.660.000
3.	EBD.953 Layanan Manajemen Kinerja Internal				√	1 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 300.000

Jakarta, 17 Desember 2025

Ketua



H. HUSBAN, S.H., M.H.
NIP. 197212231992031002